

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik yang timbul dalam rumah tangga yang tidak segera diselesaikan pasti dapat memicu adanya suatu tindak kekerasan baik fisik maupun psikis. Kekerasan yang timbul inilah yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau bisa disebut dengan KDRT. Kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh perempuan yang ada di Indonesia, menurut media massa tercatat di Komnas Perempuan dari mulai tahun ke tahun korban KDRT tersebut sangat banyak, dari tahun 2015 Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Azriana mengungkapkan dalam catatan tahunan Komnas Perempuan dalam setahun berjumlah 321.752 yang sebagian besar bersumber dari data kasus atau perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama.¹ Kemudian pada tahun 2016 perempuan masih rentan menjadi korban kekerasan yang hasilnya tercatat ada 259.150 kasus kekerasan di tahun tersebut.² Masuk pada tahun 2017 Komnas Perempuan membeberkan adanya

¹ CNN Indonesia (8 Maret 2016), “Perempuan Paling banyak Laporkan Kasus KDRT”, diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160307183325-26-115932/perempuan-paling-banyak-laporkan-kasus-kdrt/> pada : Jumat, 17 November 2017, pukul 0.50 WIB

² Kompas.com (7 Maret 2017), 2016, ada 259.150 “Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan”, diakses dari: <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/19240821/2016.ada.259.150.kasus.kekerasan.terhadap.perempuan>. Pada : Jumat, 17 November 2017, pukul 1.24 WIB

laporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga berjumlah lebih dari 5.700 pada tahun ini.³

Selain data dari KOMNAS Perempuan ini, dapat diketahui pula berita tentang KDRT yang tidak hanya dilakukan oleh kelompok ekonomi lemah tetapi juga oleh golongan atas dan/ atau berpendidikan yang dapat diketahui dari di berbagai media baik di media cetak maupun media elektronik, antara lain sebagai berikut (1) Kasus dr Letty yang ditembak mati oleh suaminya sendiri, Ryan Helmi, bahkan isterinya (dr Letty) ini sebelum ditembak sering menerima kekerasan dari suaminya (Ryan Helmi).⁴ (2) Kasus suami potong kaki isterinya (Ni Putu Kariani) yang terjadi di Bali yang saat ini korban berada di RS Sanglah, Bali dalam perawatan, korban di dampingi Tim LBH Bali.⁵ Data-data yang dipaparkan di atas belum menggambarkan kasus KDRT yang sesungguhnya karena KDRT ibarat gunung es.

Sehubungan dengan itu, Yuniyanti Chuzaifah, Wakil Ketua Komnas Perempuan menilai bahwa negara perlu hadir untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan baik dalam ranah personal, komunitas maupun negara.⁶ Ia pun mendorong agar DPR RI segera membuat dan mengesahkan berbagai

³ KBR Indonesia (8 Maret 2017), "Catatan Tahun 2017 Komnas Perempuan, Kekerasan di Ranah Persoal Tertinggi", diakses dari: http://kbr.id/berita/03-2017/catahu_2017_komnas_perempuan_kekerasan_di_ranah_personal_tertinggi/89070.html pada : Jumat, 17 November 2017, pukul 1.07 WIB

⁴ Clara Maria Tjandra Dewi H, "Kepala Dokter Letty Pernah Dipukul Pakai Ponsel Sampai", *Metro Tempo*, dalam <https://metro.tempo.co/read/1033515/kepala-dokter-letty-pernah-dipukul-pakai-ponsel-sampai>, akses Rabu 15 November 2017, Pukul 11.00.

⁵ BBC Media Indonesia, "Ni Putu Kariani: Kaus Suami Poong Kaki Isteri di Bali Bagian dari Gunung Es KDRT," dalam <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41251933>, akses Kamis 16 November 2017.

⁶ Media Indonesia, (7 Maret 2016), "Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Masih Tinggi", diakses dari: <http://mediaindonesia.com/news/read/32844/angka-kekerasan-terhadap-perempuan-masih-tinggi/2016-03-07>, pada: Senin, 30 Oktober 2017, Pukul 11:36 WIB.

macam undang-undang yang bertujuan melindungi perempuan dari berbagai macam tindak pidana kekerasan, baik di dalam rumah tangga maupun di tempat-tempat tertentu seperti halnya tempat perempuan banyak bekerja. Dan perlu diketahui pula bahwa KDRT itu tidak hanya terjadi dan menjadi perhatian di Indonesia, negara lain pun juga mulai memperhatikan hal itu dengan memberikan sanksi terhadap perbuatan tersebut dalam Undang-Undanganya. Hal ini seperti Negara Malaysia yang mengatur hal itu dalam *Domestic Violence Act 1994* yaitu tentang Akta Keganasan Rumah Tangga dengan No. Act 571 yang bentuk-bentuk kekerasannya lebih variatif.⁷

Pernyataan Yuniyanti Chuzaifah ini masih bersifat umum dan luas, karena untuk Kekerasan dalam Rumah Tangga itu sendiri sudah ada undang-undanganya, meskipun masih sangat sederhana, sehingga perlu perubahan, tetapi untuk kekerasan terhadap perempuan secara umum bukan dalam rumah tangga yang dirasa masih sangat kurang. Namun demikian untuk penegakan hukum⁸ dalam hal ini penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) ini yang masih belum maksimal, hal ini tidak hanya dari faktor aparat penegak hukumnya melainkan juga karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan laporan kepada aparat tentang peristiwa hukum KDRT. Lemahnya partisipasi masyarakat ini

⁷ Kuswardani, 2017, "Bentuk-bentuk kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia)", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No 4, Vol. 47, Hal. 421-438.

⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 12 dan 28, bahwa penegakan hukum pada hakikatnya adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide /konsep-konsep menjadi suatu kenyataan. Ini menurut penulis maksudnya menerapkan dan / atau melaksanakan aturan hukum dalam suatu peristiwa konkret. Dan dalam usaha ini tidak terlepas dari pengaruh faktor sosial-personal.

disebabkan oleh beberapa hal diantaranya sebagaimana masyarakat masih beranggapan bahwa KDRT itu merupakan aib dan urusan privat sehingga tidak pantas untuk ikut campur. Padahal tanpa adanya aduan dari masyarakat atau korban atau keluarga korban KDRT sulit untuk diproses, karena merupakan delik aduan. Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pelapor atau saksi KDRT cukup untuk dimanfaatkan karena Pemerintah selain UU PKDRT juga telah mensahkan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas berarti penegakan hukum dalam hal penerapan peraturan hukum dalam peristiwa hukum yang terjadi merupakan sebuah kunci untuk menekan angka kejahatan (dalam hal ini KDRT), selain itu juga memberikan perlindungan kepada korban. Oleh karena itu skripsi akan mengkaji penerapan UU PKDRT dari aspek perlindungan hukumnya dengan menganalisis putusan pengadilan, sehingga judulnya **“Perlindungan Hukum Pidana Sebagai Pelapor dan Saksi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Untuk menghindari sebuah penelitian agar tidak meluas dan terlalu melebar dari permasalahan, maka dengan ini penulis melakukan pembatasan masalah hanya sampai dengan pembahasan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Adapun dari pembatasan masalah tersebut, penulis menarik beberapa perumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana regulasi perlindungan hukum pidana terhadap saksi korban dan pelapor KDRT?
2. Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada saksi korban dan pelapor tindak pidana KDRT dilihat dari implementasi dalam Putusan Hakim Nomor: 08/Pid.Sus/2016/PN.Skt?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan dipilihnya perumusan masalah seperti di atas, maka dapat ditarik tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya regulasi perlindungan hukum pidana terhadap saksi korban dan pelapor KDRT.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum pidana terhadap saksi korban dan pelapor KDRT.

D. Kerangka Pemikiran

Masalah yang kerap dijumpai di Indonesia adalah mengenai kekerasan rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri maupun sebaliknya, dengan adanya kekerasan tersebut maka masyarakat yang ada di sekitar jika mengetahui kejadian kekerasan/penganiayaan yang dilakukan pasangan suami dan istri berkewajiban menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu:

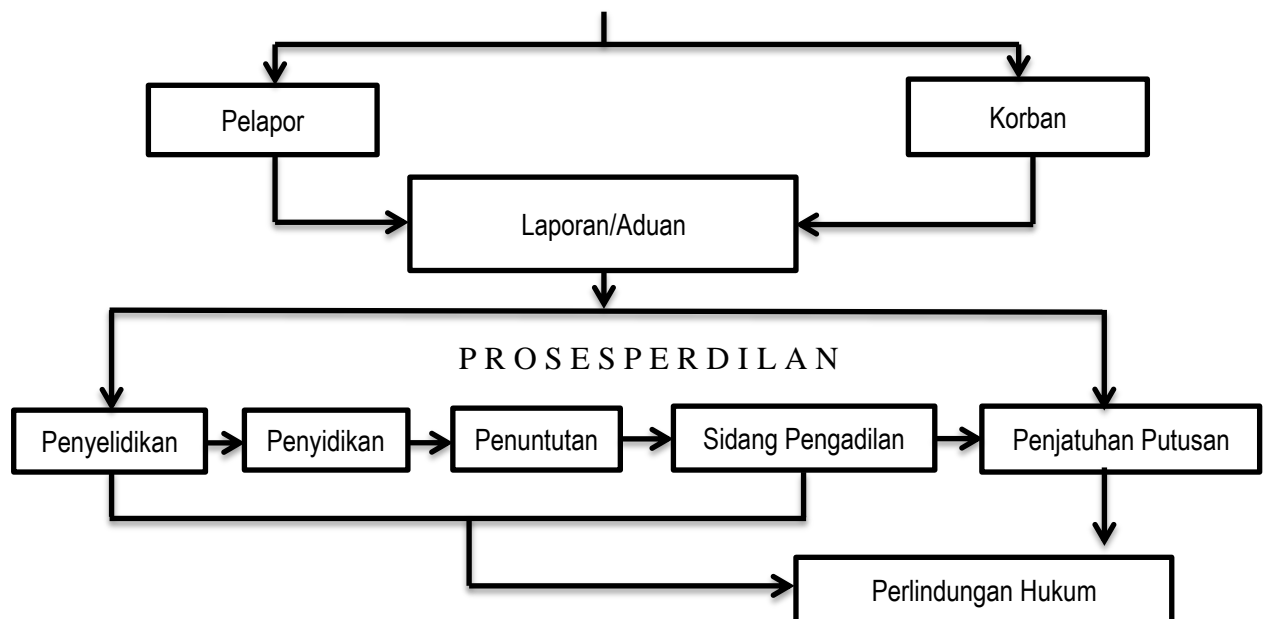
“Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: 1) mencegah berlangsungnya tindak pidana, 2) memberikan perlindungan kepada korban, 3) memberikan pertolongan darurat, 4) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”

Kurangnya pengetahuan tentang adanya perlindungan KDRT, biasanya seseorang yang dianiaya oleh pasangan tersebut hanya bisa diam dan menahan diri, begitu pun dengan saksi yang saat kejadian penganiayaan berada di tempat kejadian tersebut hanya bisa melihat karena takut untuk mencampuri urusan orang lain meskipun korban tersebut sudah terpojokkan. Dengan adanya Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT tidak hanya korban saja yang mendapat perlindungan, melainkan pelapor juga akan mendapatkan perlindungan dari kepolisian jika merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar.⁹ Oleh karena itu jika ada keluarga atau lingkungan kita terdapat seperti hal tersebut sebaiknya langsung laporkan ke pihak yang berwenang untuk dapat diadili serta diproses untuk mendapatkan keadilan. Karena pada dasarnya penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Maka dari itu untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis menyusun sebuah bagan penelitian yakni sebagai berikut:

<p>TINDAK PIDANA KDRT</p>

⁹ Bambang Waluyo, 2017, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 98.



E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁰

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analisis yaitu; suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti berdasarkan fakta yang nampak.¹¹ Yang dimana akan digambarkan mengenai perlindungan hukum pidana sebagai pelapor dan sebagai saksi korban KDRT.

¹⁰ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4.

¹¹ *Ibid.* hal. 125.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif yaitu penelitian hukum dokumenter dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintahan.¹²

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data sekunder

Yakni data yang sudah terolah dan diperoleh dari studi kepustakaan dari buku-buku maupun sumber lainnya yang diperlukan sesuai dengan judul dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, meliputi:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- (3) Undang-Undang No. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

¹²H. Ishaq, 2007, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hal. 25.

- b) Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur, buku ataupun jurnal hukum.

b. Sumber Data

Studi kepustakaan yakni data yang didapat merupakan hasil penelitian yang bersumber dari kepustakaan meliputi data yang ada peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan buku-buku hukum.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

F. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang di maksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap

keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang didalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II berisi tentang penjelasan mengenai Landasan Teoritis mengenai; Bentuk dan Jenis Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor dan Saksi Korban KDRT; Pengertian, Jenis Pelapor, Saksi, dan Korban, Pengertian, Bentuk, dan Unsur Rumah Tangga.

BAB III berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang; Regulasi Perlindungan Hukum Pidana terhadap Saksi dan Pelapor KDRT; dan Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban KDRT.

BAB IV berisi tentang Penutup yang didalamnya memuat kesimpulan dan saran terhadap penelitian ini.